

Hubungan ‘Negara Besar’—‘Negara Kecil’: Geliat Institusi pada Satu Komuniti di Dataran Tinggi Jambi

Erwin Fahmi

Abstrak

Hubungan negara dan komuniti – di sini diistilahkan sebagai ‘negara besar’ dan ‘negara kecil’ – di Nusantara perlu dirumuskan kembali. Anggapan bahwa hubungan itu telah final dengan munculnya negara-bangsa, telah runtuh pada tataran etik dan empirik ketika berbagai konflik antar ‘negara kecil’ dan antara ‘negara kecil’ dan ‘negara besar’ semakin banyak muncul atau terkuak. Karena itu, paling kurang untuk sementara, gugur pula relevansi berbagai proyek reproduksi-sosial dalam pemikiran dan kebijaksanaan administrasi arus utama, seperti otonomi daerah, yang hingga kini belum beranjak dari pengokohan agenda negara (besar).

Di Jambi, walaupun upaya ‘negara besar’ untuk menguasai ‘negara kecil’ khususnya di hulu telah berlangsung tidak kurang dari 300 tahun, namun pemberlakuan UU 5/1979 pada sisi negara (besar) dan kepentingan sirkulasi kapital pada sisi bisnis-lah sesungguhnya yang mengubah secara mendasar karakter hubungan keduanya, yaitu dari interaksi menjadi intervensi. Di dalam komuniti Sungai Tenang yang menjadi acuan studi ini, perubahan dalam tata-kuasa (power relation) dan tata-guna yang didesak dari luar tadi, berjalan seiring dengan perubahan tata-produksi dan tata-konsumsi yang menguat dari dalam. Ekspresi hal ini terbaca dalam proses akomodasi struktur formal, namun resistensi terhadap institusi (norms, values and rules) penopangnya. Pada komuniti yang baru terbuka secara fisik namun langsung harus berhadapan dengan desakan perubahan besar, termasuk ‘serbuan’ kaum lapar-tanah dari wilayah lain, institusi asli memberi pembenaran pada hak-hak istimewa warga asli. Karena itu, ketika tekanan (sekaligus perlindungan) negara melemah dalam 3 tahun terakhir, berlangsung proses re-definisi tatanan tadi, dengan hasil (sementara) menguatnya posisi pemimpin dan masyarakat adat, berdampingan dengan pemimpin dan lembaga pemerintah.

Walaupun situasi “bebas-kriminal” oleh warga -- yang telah berlangsung puluhan tahun - tetap dapat dipertahankan, namun politisasi identitas yang menguat dalam 3 tahun terakhir tetap mengirimkan sinyal ‘buruk’ terhadap proses teritorialisasi yang telah berjalan. Proses teritorialisasi merupakan pengikat masyarakat politik bernama Indonesia, yang notabene selalu harus diupayakan ini. Karena itu, bersikap positif terhadap geliat ini, perlu dibuka ruang tempat para pihak belajar menegosiasikan kepentingan, asumsi-asumsi dan harapan-harapannya, serta belajar mendefinisikan bersama konstelasi lingkungan yang dihadapi, dan arah-arah perubahan yang ingin diraih, dalam kerangka hidup bersama.